

**ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA**

Kota : Medan

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian KInerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Perda No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Ada	Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
			2	Rasio Rumah ber IMB	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah rumah seluruhnya}}$	$\frac{218.373}{469.638} \times 100\%$	46,49%	Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Perda No.4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota	Ada	Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan KTP	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Perda Kependudukan No.18 Tahun 2002	3 Hr	Dinas Kependudukan, dan Capil,
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	PERDA Kependudukan No.18 Tahun 2002	Rp 0 (Tanpa Bayar)	Dinas Kependudukan, dan Capil,
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2008 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	$\frac{390}{10.000} \times 100\%$	3,9 per 10.000 penduduk	Badan Satpol PP,
		Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah	7	Demo / protes thd PERDA / PerWalkot	Jumlah aksi demo per tahun	Dokumen Humas	22 Kali	Humas/ Satpol PP
		Kebijakan bidang PSK dan PKL	8	Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	-PKL : Perda No.31 Tahun 1993, SK Walikota Medan No.54 Tahun 1983	Ada	Setda Kota / Satpol PP

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
						-PSK / Gepeng : Perda No.4 Tahun 2004		
		Peraturan tentang Kebersihan kota	9	Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan kota	PERDA No.8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan	Ada	Dinas Kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	10	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman LPPD 2008	Tidak Tepat	Setda Kota Medan
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Laporan Keuangan 2008 Laporan Kinerja thn 2008	Tidak Tepat Tidak Tepat	Setda Kota Medan
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkot. Dinas Kesehatan/ Dinas Pendidikan	2 Urusan	Dinas Kesehatan/ Dinas Pendidikan
		Konsultasi antara pemerintahan kota dengan pemerintah	13	Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dgn Pemerintah	Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Pemerintah per tahun	Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2008	914 Kali	Setda Kota Medan
		Konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	14	Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun	Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2008	184 Kali dengan tidak diterbitkan SPPD	Setda Kota Medan

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Hubungan antar daerah	15	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MoU dengan kota di Luar Negeri (Sister City) • 1 Mou dengan kota di dalam negeri (Kota Semarang) 	5 MOU	Bag Hubungan Antar Kota Antar Daerah (Hakda)
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	16	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan wilayah lingkaran luar dan penanggulangan kemiskinan 2. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kota 3. Peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat 4. Pengembangan daya saing UKMK dan peningkatan penanaman modal daerah 5. Membangun kota jasa, perdagangan dan industri serta pemantapan iklim ketenagakerjaan 6. Penciptaan birokrasi yang kreatif, inovatif, responsive dan professional. 	$\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$	Bappeda Kota Medan
		Kewenangan	17	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	$\frac{23}{26} \times 100\%$	88,46 %	Setda kota

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Keuangan	18	Waktu penetapan PERDA APBD 2008	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2008	Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2008	Tidak Tepat	Dokumen PERDA APBD 2008
			19	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PERDA No 11 Tahun 2003 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	Setdakot Medan
			20	Belanja untuk <u>pelayanan dasar</u>	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	$\frac{447.292.223.738}{1.881.386.640.742} \times 100\%$	23,77 %	Bag Keuangan Setdakot Medan
			21	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	$\frac{817.132.042.121}{1.881.386.640.742} \times 100\%$	43,43 %	Jlh belanja selama thn 2008 termasuk yg dibiayai non APBD
		PELAYANAN PUBLIK	22	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Dokumen standar pelayanan publik'	Tidak Ada	Setda
		Kepegawaian	23	keberadaan <u>Standar kompetensi jabatan</u>	Ada atau tidak adanya Kep Walkot tentang standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan	Ada	Badan Kepegawaian Daerah

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
			24	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Tidak ada	Tidak ada	Badan Kepegawaian Daerah
		Kelembagaan	25	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2007	PERDA Kelembagaan	Tidak ada	PERDA Kelembagaan
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	26	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2008	Lembaran Daerah	2 PERDA - Perda APBD - Perda P.APBD	Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	27	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2008	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2008 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2008	1. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Ranperda Urusan Pemerintah Kota Medan 3. Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 4. Ranperda Rumah Susun di Kota Medan 5. Perubahan atas Perda Kota Medan No.1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan 6. Ranperda	100 %	Sekretariat DPRD

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
						Penyelenggaraan sistem administrasi Kependudukan di Kota Medan 7. Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 $\frac{8}{8} \times 100\%$		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Pengambilan keputusan DPRD	28	Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama satu tahun	Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam satu tahun X 100%	Jumlah Keputusan dgn voting =1 kali $\frac{0}{32} \times 100\%$	0%	Agenda Sidang DPRD dgn Pemko Thn 2008 (Sekretariat)
		keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	29	keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2008 x 100%	Jumlah keputusan yang ditindak lanjuti oleh Pemda = 8 keputusan $\frac{8}{8} \times 100\%$	100%	Setda

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Walikota	30	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2008 x 100%	Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2008 = 66 Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti = 66 66 ----- x 100% 66	100 %	Sekda dan Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Walikota	31	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2008 x 100%	1. Peraturan Walikota Medan Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Pemberian Keringanan Dasar Penaanan Tarif Pajak Reklame Billboard Dan Mini Billboard 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Letak, Jarak Reklame Dan Penetapan Kelas Jalan Serta Harga Nilai Strategis Pemasangan Reklame Di Kota Medan 3. Peraturan Walikota Medan Nomor 3		Sekda/Bagian Hukum Lembaran Daerah

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
						<p>Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di Kota Medan</p> <p>4. Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tarif Maksimum Angkutan Taksi Di Kota Medan</p> <p>5. Paeraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Dan Hibah Kepada Badan, Organisasi Sosial, Masyarakat Dan Ormas Di Kota Medan</p> <p>6. Paeraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tarif Maksimum Angkutan Taksi Di Kota Medan</p> <p>7. Peraturan Walikota Medan Nomor 7</p>	100 %	

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
						Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di Kota Medan 7 ----- x 100% 7		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	32	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	1 ----- x 100% 3	33,33 %	Setda/Bagian Hukum Lembaran Daerah
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN	Konsultasi publik	33	Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA	Jumlah konsultasi publik	Pelaksanaan Konsultasi Ranperda Sistem Kependudukan	1 Kali	Sekretariat DPRD Setda
		PERDA tentang konsultasi publik	34	Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerWalkot	PERDA/PerWalkot mengenai konsultasi publik	Tidak Ada	Setda

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
	KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	35	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur,	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWalkot	Media informasi Pemko Medan : - Website - Bag Humas - Leaflet - Brosur - Running text - Papan Pengumuman - Media Cetak dan elektronik - Mobil Penerangan Keliling	Ada	Setda Humas
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	36	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	$\frac{1.118.151.352.611}{1.065.854.968.000} \times 100\%$	104 %	Bag. Keuangan
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU		37	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Laporan Keuangan 2008 $\frac{681.300.786.852,73}{816.636.938.000} \times 100\%$	83,42 %	Bag. Keuangan	
Alokasi Belanja pada APBD		38	Belanja Publik terhadap total APBD	Jumlah belanja publik dibagi APBD x 100%	Laporan Keuangan 2008 $\frac{974.720.826.967}{1.881.386.640.742} \times 100\%$	51,8%	Bag Keuangan	

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD X 100%	Laporan Keuangan 2008 356.137.806.555 ----- x 100% 1.764.199.302.097	20%	Bag. Keuangan
		Besaran realisasi pinjaman daerah	40	Besaran pinjaman yang terrealisasi terhadap rencana pinjaman	Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100%	Laporan Keuangan 2008	100	Bag. Keuangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	41	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI		Setda Bag. Keuangan
		Besaran SILPA	42	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	Data SILPA thn 08 303.170.162.582,02 -----x 100% 1.764.199.302.097	17,18%	Setda Bag. Keuangan
		Proporsi belanja	43	Proporsi <u>belanja</u> <u>langsung</u>	Jumlah belanja langsung dibagi jumlah belanja APBD X 100%	Laporan Keuangan 2008 974.720.826.967 -----x 100% 1.881.386.640.742	51,81%	Setda Bag. Keuangan

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Realisasi pendapatan	44	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	Laporan Keuangan 2008 $\frac{391.351.163.598,44}{1.764.199.302.097} \times 100\%$	22,18%	Setda Bag Keuangan
		Realisasi belanja	45	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja tahun 2008 dibagi total belanja APBD X 100%	Laporan Keuangan 2008 $\frac{1.477.992.592.606}{1.881.386.640.742} \times 100\%$	78,56%	Setda Bag Keuangan
		Pengawasan Inspektorat Kota	46	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti = 50 dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2008 = 50	Laporan hasil tindaklanjut 50 ----- x 100% 50	100 %	Inspektorat Kota Medan
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	47	Rasio realisasi PAD 2007 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2008 dibagi dengan potensi PAD X 100%	$\frac{391.351.163.598,44}{375.646.522.285,10} \times 100\%$	104,18 %	Bagian Keuangan
		Peningkatan PAD	48	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%	$\frac{78.883.793.156}{312.467.370.442,93} \times 100\%$	25,24 %	Bappeda Bag Keuangan
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Inovasi baru	49	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Walikota Medan Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan PERDA Kota Medan Nomor 18 Pelayanan KTP dan KK Gratis Bea Siswa untuk Siswa/ pelajar 	5 Kegiatan	Bappeda

	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2008)	Capaian Kinerja	Sumber Data
						<p>Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Prosedur dan Standar Waktu Proses Penerbitan KTP dan KK di Lingkungan Pemerintah Kota Medan • Keputusan Walikota tentang Inovasi Peraturan Walikota Medan nomor 4 tahun 2005 tentang Pembebasan Retribusi Akta Kelahiran di Kota Medan 	<p>Miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Puskesmas Gratis • JPKMS • KIBLA (Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak) 	
		Pengadaan barang dan jasa	50	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Sistem Informasi	Tidak ada	Setda
		Daya saing daerah	51	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2008	Register ijin investasi	Tidak Ada	KPMD

